

**KONFLIK GAM-RI DAN KERENTANAN PANGAN
MASYARAKAT TRANSMIGRAN
(Studi Kasus di Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek,
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh)**

Amiruddin Ketaren¹, Pangeran P.P.A. Nasution^{2 3}

Submitted Article: 11 February 2018

Reviewed Article: 11 April 2018

Accepted Article: 14 June 2018

Abstract

This article presents a narrative snippet of circumstances of the food security over the Javanese transmigrants during the Acehese Freedom Movement (GAM) vs Indonesian Government (NKRI) conflict. The data presented through a case study in Cot Girek sub-district, Aceh Utara district, Aceh. The article elaborates food availability strategies during the conflict, food accessibility, food security. The narration in this article is presented based on data obtained by qualitative research methods. Primary data obtained by interview (in-depth). The narrative notion in this paper propose that conflict often occurs as a result of some past memories coverage racial exclusion, religion, to political and economic discrimination; including the seizure of strategic resource controls, such as land, water, trade routes, and mineral deposits of the earth.

Dissatisfaction that encompasses the disparity of land distribution and discriminatory economic policies that hinder decent living standards for every community. Tensions escalate into violent conflicts especially as economic conditions worsen and people face a subsistence crisis. Conflict is created when everyone feels that they have nothing to lose and are therefore willing to fight for resources, political power, and cultural respect.

It is fitting for all parties to ensure social integration in the proper arrangement of economic and political distribution and in the spirit of equality. On the issue of food security, the goal is to create conditions for everyone at any time to gain food to support survival.

Keywords: Conflict of 'GAM-RI', Community of Java Transmigrants, Vulnerability and Food Security.

Abstrak

Artikel ini menyajikan satu cuplikan narasi tentang kerentanan pangan masyarakat transmigran Jawa pada masa konflik GAM-RI. Data disajikan dalam rupa studi kasus di Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Eksplorasi isu

¹ Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Malikussaleh, Aceh

² Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Malikussaleh, Aceh

³ Korespondensi Penulis, Email: putraperkasa@unimal.ac.id

meliputi strategi ketersediaan pangan (*food availability*) semasa konflik, Keterjangkauan pangan (*food accessibility*), Keterjaminan/kepastian mendapatkan pangan (*food stability*) sesuai mutu dan keamanan pangan. Narasi dalam Artikel ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh dengan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan via wawancara (*in-depth interview*). Gagasan naratif dalam tulisan ini mengajukan bahwa konflik seringkali terjadi sebagai imbas dari sebagian ingatan masa lalu dan kebijakan kontemporer tentang pengecualian ras, agama, hingga diskriminasi politik maupun ekonomi; termasuk perebutan kendali sumber daya strategis, seperti tanah, air, rute perdagangan, dan deposit mineral bumi.

Petaka ketidakpuasan yang meliputi kesenjangan distribusi lahan dan kebijakan ekonomi yang diskriminatif sehingga menghalangi standar hidup yang layak bagi setiap kelompok masyarakat. Ketegangan meningkat menjadi konflik kekerasan terutama ketika kondisi ekonomi memburuk dan orang-orang menghadapi krisis subsisten. Konflik tercipta ketika setiap orang merasa bahwa mereka tidak akan merugi dan karenanya bersedia memperjuangkan sumber daya, kekuatan politik, dan penghormatan budaya.

Sungguh sudah sepatutnya seluruh pihak menjamin integrasi sosial dalam pengaturan distribusi ekonomi maupun politik secara tepat dan dengan semangat kesetaraan. Dalam isu ketahanan pangan, tujuannya tidak lain adalah menciptakan kondisi bagi setiap orang pada setiap waktu dapat memperoleh pangan guna menyanggah kelangsungan hidup.

Kata-kata Kunci: Konflik 'GAM-RI', Masyarakat Transmigran Jawa, Kerentanan dan Ketahanan Pangan.

A. PENDAHULUAN

Kerentanan pangan muncul sebagai tema utama sebagai upaya untuk mengoperasionalkan definisi ketahanan pangan menjadi hasil yang terukur. Dalam bencana, usaha-usaha pengurangan resiko, kerentanan, akan hadir dalam siklus sangga pangan untuk mengurangi bahaya fisik, dan mengurangi dampak bahaya pada manusia (Dilley dan Boudreau, 2001; Williams, 2013). Meskipun dalam satu pandangan dikatakan bahwa bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem masyarakat, dengan pertanda relatif sudah dikenali dan dapat diprediksi, namun bencana juga terjadi sebagai "*unexamined normality*" atas ketidakmampuan manusia dan sistem di dalam mengantisipasi bencana.

Suatu bencana mengakibatkan terganggunya stabilitas, menyebabkan ketidakpastian, merusak kemampuan adaptasi masyarakat, serta membahayakan

sistem pandangan dunia. Suatu bencana menyebabkan munculnya beragam status kerentanan (*vulnerability*), secara individu, kelompok, lingkungan, dan institusi. Kerentanan itu mencakup dimensi alam, fisik, teknis, ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologis, dan institusional. Situasi bencana mengakar dalam sistem ideologis, sosial, dan ekonomi yang menempatkan manusia pada status tak berdaya ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan lingkungan yang mematikan. Keadaan manusia, lingkungan, dan institusi yang rentanlah menyebabkan suatu konflik kemudian menjadi bencana bagi kehidupan manusia (Oliver-Smith dan Hoffman, 2002).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di wilayah Indonesia yang pernah mengalami bencana kemanusiaan berupa konflik bersenjata terpanjang dalam sejarah berdirinya Negara Indonesia. Konflik yang terjadi antara Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar terjadi dalam dua konflik besar, yaitu

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Pemberontakan Darul Islam (1953–1964) dan Gerakan Aceh Merdeka (1976–2005). Konflik tersebut diduga karena diawali atas kekecewaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang dianggap tidak memenuhi janji untuk memberikan kewenangan bagi Aceh dalam memerintah wilayahnya sendiri, –berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia di Aceh yang telah berlangsung sejak tahun 1976, ditandai dengan dibentuknya Gerakan Aceh Merdeka oleh Tgk. Hasan di Tiro. Konflik bersenjata dalam rentang sejarah yang panjang ini mengakibatkan korban (sipil) di Aceh mengalami intimidasi, diusir dari tempat tinggal, bahkan tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban semasa konflik berlangsung.

Dari berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan korban konflik Aceh, sejauh ini diketahui hanya sebatas tentang masyarakat Aceh yang menjadi korban kekejaman konflik. Elaborasi tematik kajian bermuara pada dimensi ideologi politik pemberontakan dan yang terkait lainnya. Sementara itu, kajian maupun penelitian yang secara serius membahas tentang upaya-upaya melanjutkan, menghadapi, dan menyelamatkan kehidupan dari kerentanan pangan di tengah konflik yang berlangsung, tidaklah banyak ditemukan (lihat Adwani, dkk., 2004; Al Chaidar, 1999; Hensengerth, 2011; Ridwan, 2000; Sugiarti, dkk., 2009).

Berdasarkan paparan latar permasalahan sebelumnya, maka, permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian adalah tentang “Ketahanan Pangan Masyarakat Transmigran Jawa Pada Masa Konflik GAM-RI” di Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Eksplorasi isu meliputi strategi ketersediaan pangan semasa konflik, yakni mengenai Keterjangkauan pangan; Keterjaminan atau kepastian mendapatkan pangan sesuai mutu dan keamanan pangan.

Meskipun begitu, mesti diakui bahwa tidak mudah mengakses informasi yang memadai guna memenuhi kehendak eksploratif terhadap isu tersebut. Salah satu

kendala adalah masih lekatnya trauma konflik yang membuat umumnya masyarakat enggan untuk menyampaikan pandangannya. Trauma konflik mengendap sebagai residu ‘ingatan sosial’ dalam kehidupan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Narasi dalam artikel ini diuraikan berdasarkan data kajian antropologi yang diperoleh dengan metode penelitian kepustakaan, wawancara, pengamatan non-partisipan, dan dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi awal serta referensi yang mendukung pemahaman terhadap fokus kajian, dan juga pengayaan perspektif pra-analitik terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berbagai sumber informasi awal ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tesis maupun disertasi, hasil laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan berbagai informasi dari berbagai media berita cetak maupun elektronik.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian sosial-budaya dengan etnosains sebagai pendekatannya. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, berupa pernyataan-pernyataan mengenai isi, sifat, ciri, dan keadaan dari sesuatu atau gejala, atau pernyataan mengenai berbagai hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa benda-benda fisik, pola-pola perilaku, atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, bisa pula keadaan lingkungan fisik, percakapan, maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat (Ahimsa-Putra, 1985; 2007:19-23). Berbagai elemen data (*emic view*) dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa untuk memperoleh suatu rangkaian deskriptif tentang strategi ketahanan pangan masyarakat transmigran Jawa pada masa konflik GAM-RI di Aceh.

Data dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi dan peristiwa yang diobservasi. Pengumpulan data/informasi

Konflik GAM-RI dan Kerentanan Pangan Masyarakat Transmigran

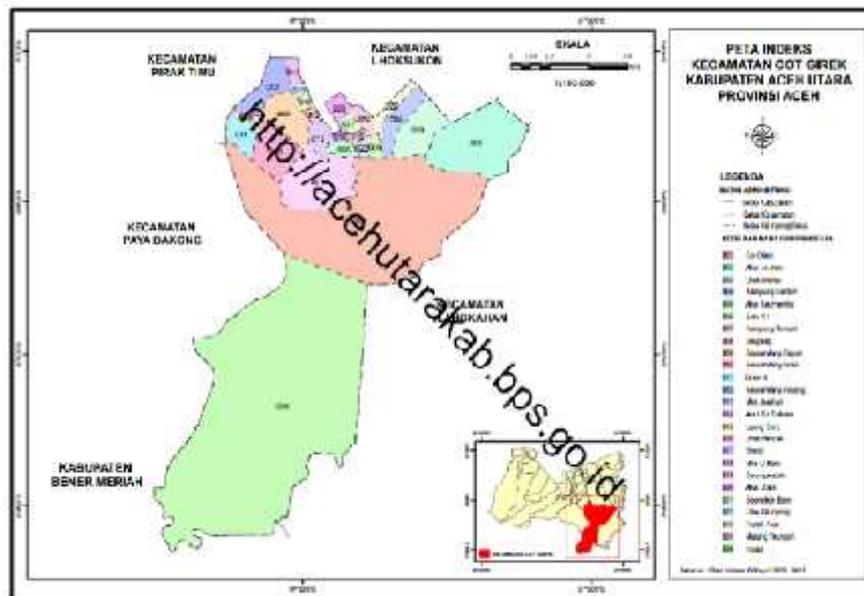
ini, peneliti sekaligus sebagai instrumen yang dilakukan dengan dokumentasi dan kegiatan wawancara (*indepth interview*), oleh karenanya Peneliti akan mencatat, serta menggunakan dukungan alat perekam, dan mengamati perilaku orang yang diwawancarai.

Data dianalisis secara etnosaintifik dengan menggunakan data kualitatif sebagai basis deskripsi. Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan bahan deskripsi untuk menggambarkan suatu fenomena atau gejala, sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini. Analisis data secara etnosaintifik dalam penelitian ini menggunakan model '*on going analysis*' yang diajukan oleh Spradley (2007), meliputi: *analisis domain*, *analisis taksonomi*, *analisis komponen*, dan *analisis tema*. Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi, dianalisis, diinterpretasi, dan dideskripsikan secara terus-menerus sesuai dengan topik, tema dan sub-sub tema dari

permasalahan penelitian. Keseluruhan kegiatan analisis ini dapat mempercepat ditemukannya rangkaian makna yang menjadi suatu satuan pengetahuan (sistem budaya), sebagai suatu kesimpulan analisis dan representasi dari kegiatan penelitian yang dilakukan (Spradley, 2007:132-133).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di tahun 2017, uraian tentang permasalahan ketahanan pangan masyarakat transmigran Jawa semasa konflik GAM-RI yang dituangkan dalam artikel ini merujuk pada kelompok masyarakat transmigran Jawa di Gampong (Desa) Cot Girek. di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Secara administratif, Gampong Cot Girek termasuk dalam wilayah Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.



Gambar 1. Peta Kecamatan Cot Girek. Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara. *Kecamatan Cot Girek dalam Angka*. 2016. Diakses pada 08 Mei 2017, <http://acehutarakab.bps.go.id>

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

1. Cot Girek: Bentang Klimatologis dan Demografis

Wilayah Kecamatan Cot Girek berada sekitar 12 Km dari jalan lintas provinsi Aceh-Sumatera Utara dan berada di ketinggian 15 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Cot Girek memiliki wilayah seluas $\pm 189 \text{ Km}^2/18900 \text{ Ha}$ atau setara dengan 5,73 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Utara. Pusat keramaian atau sentra perdagangan berada di Desa Batu XII yang juga merupakan lokasi ibukota dari Kecamatan Cot Girek. Jarak dari lokasi Gampong Cot Girek menuju Desa Batu XII diketahui berkisar 4,5 Km sedangkan untuk tiba di ibukota Kabupaten Aceh Utara, yakni Kota Lhoksukon, mesti menempuh jarak sekitar 48,5 Km. Wilayah Kecamatan Cot Girek terdiri dari 24 Desa, 3 Kemukiman, dan 96 dusun. Aparat desa yang bertugas di Kecamatan Cot Girek terdiri dari 24 Kepala Desa, 21 Sekretaris Desa (Non PNS), 3 Sekretaris Desa (PNS), 96 Kepala Dusun dan 195 *Tuha Peut Gampong*. Fasilitas pemerintahan desa di Kecamatan Cot Girek terdiri dari 9 kantor desa dan 4 balai desa.

Topografi wilayah relatif mendatar dengan sebagian wilayah dikelilingi kawasan perbukitan. Dari 24 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Cot Girek, diketahui ada 3 desa yang terletak di kawasan perbukitan. Lokasi pemukimannya kini secara dominan dikelilingi oleh kawasan perkebunan dan sebagian kawasan hutan *Gunung Leuser*. Kecamatan Cot Girek berada pada bentang geografis yang berbatasan dengan beberapa wilayah berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Lhoksukon
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Pirak Timur
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Langkahan

Secara klimatologis, rerata suhu udara di Kecamatan Cot Girek terutama pada Tahun 2014 berkisar antara $25,4^{\circ}\text{C}$ hingga $27,3^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban udara (*humidity*) bervariasi rata-rata antara 77% sampai dengan 85%. Cot Girek mengalami hari hujan sebanyak 165 hari dengan curah hujan tertinggi tercatat 428,1 mm dan cenderung terjadi pada kisaran Bulan November.

Selanjutnya terkait kondisi demografi. Pada tahun 2014, diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Cot Girek pada tahun 2014 berjumlah 21.587 jiwa. Laju populasi penduduk mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk sebanyak 21.102 jiwa. Dengan wilayah seluas 189 Km^2 , pada tahun 2013 tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Cot Girek berada pada level 97, artinya setiap radius 1 Km^2 dimukimi oleh sekitar 97 jiwa.

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin mengindikasikan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2014, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk Kecamatan Cot Girek relatif didominasi oleh penduduk muda dan dewasa yang berada di rentang umur 5 tahun hingga 30 tahun, dan jumlah terbesar adalah yang berumur 10 sampai 14 tahun. Data tersebut dapat dilihat dari grafik penduduk Kecamatan Cot Girek menurut kelompok umur di Tahun 2013 terkategori tipe ekspansif. Sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Diagram menunjukkan kelompok penduduk berusia muda tersebut memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rasio ketergantungan penduduk berusia tua yang rendah, sebesar 9%.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2015)

	Desa/ Gampong	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cot Girek	4.242	4.222	8.464
2	Alue Leuhob	731	705	1.436
3	Lhok Merbo	508	783	1.271
4	Kampung Barisan	355	386	750
5	Alue Seumamba	273	283	556
6	Batu XII	654	657	1.311
7	Kampung Tempel	529	455	984
8	Beurandang Dayah	189	185	374
9	Seupeng	89	103	192
10	Beurandang Asan	284	281	565
11	Drien II	142	149	292
12	Beurandang Krueng	215	155	372
13	Trieng	473	551	1.024
14	Ara	267	287	551
15	Jeulikat	109	102	218
16	Lueng Baro	119	136	258
17	Lhok Reuhat	161	177	338
18	U Baro	352	359	711
19	Ceumpeudak	320	203	523
20	Alue Drien	135	144	280
21	Seunubok Baro	127	119	246
22	Ulee Gampông	232	256	488
23	Pucok Alue	162	185	325
24	Matang Teungoh	139	135	275
	Jumlah	10.734	11.030	21.600

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara. *Kecamatan Cot Girek dalam Angka. 2016*. Diakses pada 08 Mei 2017, <http://acehutarakab.bps.go.id>

Hingga Tahun 2014, lapangan usaha di Kecamatan Cot Girek pada sektor pertanian memiliki persentase paling tinggi, yaitu sebesar 70% yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan dan

kehutanan. Selain pertanian, sektor perdagangan berada pada peringkat kedua dengan persentase sebesar 12% dan diikuti sektor bidang jasa lainnya.

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan Desa

	Desa/ Gampong	Luas Desa (Ha)	Penggunaan Lahan	
			Lahan Sawah	Bukan Lahan
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cot Girek	14.050	-	14.050
2	Alue Leuhob	1.322	-	1.322
3	Lhok Merbo	100	-	100
4	Kampung Barisan	275	58	219
5	Alue Seumamba	190	58	130
6	Batu XII	300	23	277
7	Kampung Tempel	657	17	640
8	Beurandang Dayah	100	35	65
9	Seupeng	130	18	111
10	Beurandang Asan	158	4	148
11	Drien II	123	24	97
12	Beurandang Krueng	100	48	52
13	Trieng Lsk Selatan	100	25	75
14	Ara Lsk Selatan	100	32	68
15	Mnie Jeulikat	100	40	60
16	Lueng Baro	100	50	50
17	Lhok Reuhat	100	50	50
18	Mnie U Baro	100	35	65
19	Ceumpeudak	110	22	88
20	Alue Drien	150	35	115
21	Seunubok Baro	130	31	99
22	Ulee Gampông	148	26	123
23	Pucok Alue	150	30	120
24	Matang Teungoh LS	100	20	80
	Jumlah	18.820	704	18.114

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara. *Kecamatan Cot Girek dalam Angka. 2016*. Diakses pada 08 Mei 2017, <http://acehutarakab.bps.go.id>

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Selanjutnya, berdasarkan tabel penguasaan lahan pada tahun 2016 yang tertera di atas, *Gampong Cot Girek* tidak lagi memiliki lahan persawahan yang mengindikasikan ketiadaan aktivitas ekonomi bertani padi. Kebutuhan bahan pangan seperti beras diketahui sangat bergantung dari ketersediaan beras atau hasil panen padi pada *gampong-gampong* (desa) tetangga terdekat. Masyarakat Cot Girek pada umumnya menyandarkan kehidupannya pada usaha perkebunan, persawahan dan pemanfaatan hasil hutan.

2. Senarai Bencana Kemanusiaan: Latar Konflik GAM vs Pemerintah NKRI di Aceh

Mengungkap rangkaian upaya ketahanan pangan masyarakat transmigran Jawa di Gampong Cot Girek bukanlah perkara yang mudah. Pada keadaan kehidupan yang rutin atau normal saja sulit untuk menemukan sistem budaya yang mengatur tentang ketahanan pangan, apalagi dalam masa sulit ketika terjadi konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada periode puncak di tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Akhir dari konflik ditandai oleh gencatan senjata dan dengan disepakatinya perdamaian antara pihak GAM dan Pemerintah NKRI yang dikenal dengan 'MoU Helsinki'. Guna mengetahui riwayat konflik bersenjata yang terjadi wilayah Aceh, sebaiknya terlebih dahulu dipaparkan secara ringkas dalam bagian paragraph selanjutnya.

Aceh sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan wilayah (perniagaan) strategis yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera, antara Samudera Hindia dan Selat Malaka, sebelum pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Aceh pada tahun 1903 merupakan entitas politik independen. Selama berabad-abad, Aceh dipimpin dan dikendalikan oleh para suksesi Sultan Ali Mughayat Syah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-19, Aceh mengalami kemajuan signifikan di bidang politik dan ekonomi.

Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan yang paling penting di Asia Tenggara, mengendalikan pelabuhan besar di seluruh Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu (Reid, 1969:3). Kekuatan Aceh secara bertahap menurun, sebagai akibat dari kedua konflik internal dan persaingan antara kekuatan kolonial Inggris dan Belanda untuk menguasai sumber daya yang kaya.

Selama periode kolonial Jepang di Aceh yang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945, Jepang juga memerintah wilayah Aceh melalui bangsawan lokal. Ketika Jepang kalah, revolusi sosial pecah antara bangsawan tradisional yang mendukung kembalinya Belanda dengan para pemimpin agama yang pro-kemerdekaan Republik Indonesia. Akar perpecahan antara para pemimpin rakyat Aceh berhubungan dengan pertikaian panjang dalam kepentingan penguasaan tanah, peradilan dan otoritas administratif yang telah dimulai selama Perang Aceh, dan terus berlangsung selama masa penjajahan. Selama periode revolusi sosial, banyak bangsawan dan keluarga mereka yang terbunuh maupun dipenjarakan oleh pasukan pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh para pemimpin agama, dan kemudian menciptakan struktur sosial baru di Aceh berdasarkan kesatuan dalam Islam di bawah kepemimpinan para pemimpin agama (Lihat Kell, 1995:9).

Jika merunut narasi historis tentang kehidupan sosial-politik di Aceh, akan ditemukan kunci sejarah awal mengapa ada perasaan bahwa status Aceh berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Pertama, Aceh menolak penjajahan lebih lama dari hampir seluruh wilayah lainnya di Indonesia, dan penjajahan di Aceh berakhir dalam periode relatif sangat singkat. Kedua, revolusi sosial yang terjadi pada Desember 1945 hingga Maret 1946 secara permanen mengubah struktur sosial pada rakyat Aceh dengan dalih dominasi pemimpin agama dan sadar kelas yang menyertainya. Ketiga, selama revolusi kemerdekaan, diklaim bahwa pihak kolonial Belanda yang meninggalkan wilayah Aceh, dan Aceh menetapkan dirinya dengan status independen yang dimiliki sejak masa pra-kolonial.

Konflik GAM-RI dan Kerentanan Pangan Masyarakat Transmigran

Tidak hanya itu, pada tahun 1947, Presiden Soekarno membujuk Aceh untuk bergabung dengan Republik Indonesia, menjanjikan bahwa Aceh akan diberikan otonomi dalam Indonesia, dan memungkinkan untuk menerapkan Hukum Islam. Keempat, atas dasar bujuk-janji tersebut, Aceh memberi kontribusi besar untuk Republik Indonesia yang masih berusia sangat muda kala itu. Dapat dikatakan, rakyat Aceh membiayai pembelian pesawat pertama bagi Indonesia, mendanai pembentukan pos diplomatik di Singapura, India dan PBB, dan memberikan kontribusi keuangan bagi kas Pemerintah Indonesia ketika republik baru ini hampir bangkrut (Ricklefs, 1993:220).

Aceh merupakan provinsi dengan sumberdaya alam yang berlimpah, namun ironis, wilayah bangsa ini tidak luput dari catatan sejarah konflik yang menyertainya. Pemberontakan oleh kelompok pasukan bersenjata lokal (*indigenous armed militia*) terhadap pemerintah Republik Indonesia merupakan benih konflik yang ditaburkan sejak awal periode kemerdekaan, pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada periode pemerintahan selanjutnya, masa kepemimpinan Soeharto, wilayah Aceh dikembangkan dari provinsi yang dianggap 'miskin' menjadi provinsi dengan pertumbuhan perekonomian tercepat di Indonesia. Namun, sebagian besar elit pemimpin masyarakat Aceh percaya bahwa mereka tidak mendapatkan bagian proporsional dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pandangan tersebut memicu perasaan anti-Jakarta dan juga meningkatkan popularitas Gerakan Aceh Merdeka (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh. Selama periode Soeharto (1966-1998), ada tiga isu politik dan ekonomi yang penting dan berkontribusi terhadap kerusakan hubungan antara Aceh dan Pemerintah Indonesia di masa Orde Baru: eksploitasi ekonomi, persaingan yang sedang berlangsung di Aceh antara pemimpin agama dan kaum bangsawan tradisional, dan perubahan

politik dan ekonomi secara cepat yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru.

Pada tanggal 4 Desember 1976, Tgk. Hasan di Tiro seorang aktivis politik terkemuka dari Kabupaten Pidie, secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Aceh dan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto masa itu menanggapi deklarasi ini dengan segera melancarkan operasi militer di Aceh, berkonsentrasi pada daerah Pidie dan sekitarnya. Solusi militer oleh pemerintah Suharto yang dilaksanakan di akhir 1980-an memperburuk kondisi hak asasi manusia di Aceh. Operasi militer oleh pemerintah Indonesia berhasil membatasi kegiatan Gerakan Aceh Merdeka tetapi gagal untuk menangkap Tgk. Hasan di Tiro. Pada tahun 1979, Hasan Tiro meninggalkan Aceh dan dalam pengasingannya mendirikan satu pemerintahan di Swedia. Selama periode tahun 1980, militer Indonesia menyatakan kemenangan atas pertempuran melawan Gerakan Aceh Merdeka.

Namun, pada awal 1989, Gerakan Aceh Merdeka kembali memperlihatkan agresinya dengan menyerang markas militer dan pos polisi di berbagai wilayah di Aceh. Pada pertengahan 1990, Gerakan Aceh Merdeka telah memperoleh dukungan lebih besar dari rakyat Aceh, terutama di daerah Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Ibrahim Hassan dengan dukungan politik dari Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Gubernur Aceh masa itu, meminta Presiden Soeharto menambah jumlah personel militer di Aceh untuk menghadapi agresi GAM. Permintaan Ibrahim Hassan dituruti oleh pemerintah Indonesia dengan mengerahkan sekitar 6000 pasukan di Aceh, dan mendapat penambahan lagi menjadi sekitar 12.000 personel.

Segera setelah pasukan tiba, wilayah Aceh ditetapkan sebagai 'Daerah Operasi Militer' (DOM). Status DOM di Aceh terus berlangsung sampai Agustus 1998. Pembenaan kewenangan memulihkan keamanan dan ketertiban, -pihak berwenang diberi keleluasaan

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

mengamankan orang-orang (termasuk warga sipil) yang diduga menjadi anggota atau pendukung Gerakan Aceh Merdeka.

3. Bermulanya Krisis Pangan di Cot Girek: Potret Mikro-Historis

Sebagaimana telah didiskusikan oleh banyak ilmuan di berbagai media yang lain bahwa perdamaian dan konflik yang terjadi merupakan gagasan tentang keamanan dan kekuasaan dalam lintasan historikal. Kesadaran historis memproyeksikan sisi pandang yang berbeda mengenai bagaimana perdamaian diasuh dalam hubungan yang tidak setara pada akar konflik. Agresi politik seringkali mencurigai perdamaian dan keamanan manusia dalam struktur makna yang tidak setara. Pertanyaan yang lebih luas tentang hubungan yang tidak setara dalam pertarungan melawan penindasan ras, etnis maupun kelas sosial (lihat Singh, 2010).

Begitu halnya tentang dampak yang sangat nyata dari konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Telah terjadi kelangkaan terhadap sumber daya pangan, terutama beras. Kegiatan produksi, ketersediaan, dan pendistribusian pangan sulit dilakukan mengingat situasi keamanan yang tidak kondusif. Periode Juli di tahun 1999 hingga 2001, diketahui bahwa banyak warga sipil, terutama warga transmigran Jawa di Aceh telah meninggalkan desa (*gampong*) mereka dalam menghindari tentara Indonesia yang mengejar para aktivis/anggota GAM, dengan istilah 'sweeping' yang sering mengakibatkan banyak warga sipil yang menjadi korban dari tindakan di luar hukum (persekusi). Berlindung dalam waktu yang lama di tempat pengungsian, dari hitungan hari hingga lebih dari satu tahun, di beberapa desa, banyak penduduk yang terlantar lebih dari sekali.

Setiap terjadi perpindahan/pengungsian penduduk yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka akan mengganggu siklus pertanian. Ketika mereka kembali, beberapa warga desa masih begitu ketakutan oleh kemungkinan

menjadi target 'sweeping', apalagi untuk bekerja di sawah, bahkan mereka memilih untuk tidak berada di tempat terbuka agar tidak ditangkap. Hasilnya, mereka mengalami kerugian begitu besar dari kegiatan pertanian.

Petakan sawah berukuran sangat luas yang sebelumnya produktif, kini dapat dilihat berbaring menganggur, tersedak dengan gulma. Rehabilitasi sawah sebagai sumber produksi pangan (padi) menjadi sulit. Pemilik traktor enggan mengambil resiko kehancuran aset (alat) pertanian dan kehidupan mereka sendiri, –kemungkinan mereka bisa tertangkap atau menjadi korban di tengah pertempuran. Tidak hanya aktivitas perladangan maupun pengolahan lahan pertanian mereka yang terhenti dan hampir mati, pihak tentara maupun kepolisian juga sering mencuri makanan dan persediaan benih padi ketika melakukan 'sweeping'. Banyak rumah tangga yang tidak lagi memiliki aset untuk dijual. Putus asa, dihantui trauma mendalam merupakan kenyataan tragis pada ribuan rakyat Aceh yang mengalami kemiskinan kronis dan kerawanan pangan akut masa itu.

Peristiwa konflik bersenjata antara pihak GAM dan Pemerintah NKRI merupakan tragedi kebencanaan yang menjadi pengalaman begitu dekat dan lekat bagi masyarakat Aceh secara umum, dan terutama bagi masyarakat transmigran Jawa di Cot Girek. Orang Jawa transmigran di Cot Girek termasuk kelompok masyarakat yang sebenarnya terjebak dalam pusaran sengketa politik-ekonomi terkait kewenangan mengakses dan mengelola sumberdaya regional di Aceh. Perasaan anti-Jakarta yang berkembang menjadi anti kelompok etnik tertentu yang merepresentasikan "ke-Jakarta-an".

Pemerintah NKRI yang menjalankan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam secara dominan dan sentralistik, berada di Jakarta yang secara geografis berada di Pulau Jawa. Dimensi (ruang) geografis bergerak ke dimensi etnis, yaitu menempatkan sentimen anti-Jakarta kepada etnis Jawa yang berada di Aceh sebagai bentuk resistensi atas dominasi Pemerintah

NKRI di Aceh dan perwujudan sentimen yang menggerakkan konflik dimaksud.

Pengalaman tragedi kebencanaan yang bersifat traumatik bagi orang Jawa transmigran di Cot Girek kemudian mampu mengubah keyakinan dan sikap tentang berbagai hal dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Konflik bersenjata merupakan peristiwa yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan yang tak terbantahkan. Konflik yang terjadi telah mendefinisikan identitas manusia, masyarakat sipil tidak bersenjata, termasuk dalam kategori *'the other'*, akibat konflik yang bersifat deterministik bagi kehidupan masyarakat kala itu.

Konflik bersenjata merupakan kejadian yang luar biasa, di luar kendali masyarakat sipil yang tidak berdaya. Daya rusak konflik menegaskan suatu kondisi abnormal, tidak diharapkan, tidak diperhitungkan, bahkan peristiwa yang tidak direncanakan, maka, masyarakat sipil tidak sadar dan tidak siap menghadapinya, persis seperti bencana alam yang cenderung tidak dapat diprediksi. Konflik selalu menyebabkan kehancuran pada lingkungan fisik dan sumber-sumber material suatu masyarakat, serta menciptakan kebutuhan material yang mendesak. Bahkan, setiap bencana melibatkan pembicaraan tentang asumsi dan tingkah laku manusia, seperti altruisme, pilihan rasional, pemilihan pribadi, kompetisi, resiprositas, serta kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial.

Seiring masa konflik yang berlangsung, sistem pandangan masyarakat bergerak dalam menanggapi situasi konflik yang terjadi. Konflik menjadi situasi yang disiasati dan berbagai kejadiannya tidak harus selalu menjadi bencana. Masyarakat mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai korban yang tidak tertolong, tetapi terpaksa menjadi pelaku yang mampu dengan daya sesuainya masing-masing dalam menghadapi konflik, atau bahkan menghindarinya dengan segera. Sebagai proses yang sulit diuraikan dengan seksama, konflik tidak lagi menjadi suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak

terelakkan", melainkan menjadi bagian yang integral dari kehidupan rutin pada masanya.

Konflik dianggap sebagai peristiwa yang tidak terpisahkan dari suatu sistem masyarakat yang tanda-tandanya mulai dikenali dan diprediksi, meskipun tentu terjadi *'unexamined normality'* atas ketidakmampuan masyarakat dalam mengantisipasi suatu bencana. Optimisme atau ketangguhan pandangan semacam itu dapat dicapai ketika bencana telah menjadi pengetahuan kolektif bagi masyarakat melalui proses yang bersifat memaksa. Tidak semua kejadian dalam peristiwa konflik menjadi bencana yang dialami serupa oleh setiap kelompok warga pada masyarakat transmigran Jawa di Cot girek. Setiap bencana yang dialami kelompok warga transmigran Jawa di Cot Girek berhubungan dengan *'keberuntungan'* (baca: peluang kerentanan/*vulnerability*) yang ada pada mereka.

Suatu gejala konflik yang sama di satu tempat dapat mengakibatkan kekacauan bahkan kematian, namun di tempat lain tidak membawa akibat yang sama. Kerentanan itu mencakup dimensi alam, fisik, teknis, ekonomi, sosial, politik, budaya, ideologis, dan institusional. Siasat warga berkaitan dengan sistem ideologis, sosial, dan ekonomi yang dapat menempatkan mereka pada status berdaya atau tidak berdaya ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan maupun kejadian-kejadian dalam konflik yang sangat berbahaya.

4. Konflik Bersenjata dan Kerentanan Pangan di Cot Girek

Perihal yang paling jelas dari konflik bersenjata adalah penggunaan senjata secara sengaja yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam mengakses pangan sehingga terjadi kelaparan. Kekurangan pangan dan kelaparan hingga kematian terjadi ketika daerah permukiman masyarakat mengalami pengepungan oleh kelompok bersenjata, dan dengan sengaja menghancurkan persediaan makanan dan kapasitas produktif bagi ketersediaan pangan sehingga populasi menjadi sub-misi konflik bersenjata. Salah satu praktik

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

pengepungan yang terjadi mencakup pencegahan atau pengalihan perhatian bantuan pangan oleh kelompok peduli kemanusiaan terhadap para penerima manfaat, yakni masyarakat korban konflik.

Selain itu, terjadi penghancuran persediaan pangan, ternak, dan aset lainnya yang merupakan kantung-kantung daerah penghasil makanan; blokade persediaan makanan; sanksi ekonomi; hingga pembatasan gerak bagi lembaga-lembaga donor yang secara selektif menjadi terhambat dalam memberikan bantuan pangan. Padahal bantuan kemanusiaan merupakan salah satu instrumen kebijakan utama yang digunakan oleh komisioner internasional untuk membantu meringankan bencana kelaparan akibat konflik yang berlangsung.

Bantuan kemanusiaan dan khususnya bantuan pangan kala itu menuai kritik bahwa segala bentuk bantuan bukan hanya tidak efektif, namun juga dengan penuh tuduhan dikatakan sebagai tindakan yang mempromosikan persekutuan dari salah satu pihak yang berkonflik.

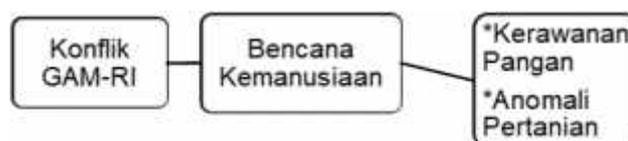
Tidak hanya itu, seringkali bantuan pangan dicuri dalam perjalanan. Bahkan jika bantuan pangan berhasil menjangkau lokasi pendistribusian yang dituju, masih mungkin terjadi disitanya bantuan oleh kelompok bersenjata. Selain itu, sulit untuk mengetahui siapa yang menerima bantuan tersebut. Ketika pendistribusian bantuan pangan berlangsung, tidak ada yang tahu dengan pasti, apakah penerima bantuan adalah masyarakat selaku korban? Atau bisa saja penerima bantuan adalah salah

seorang dari pihak yang berkonflik namun menyembunyikan identitasnya dengan berpenampilan selayaknya masyarakat sipil yang menjadi korban. Dari risalah peristiwa yang dialami masyarakat di Cot Girek, muncul gagasan bahwa bantuan pangan pun dapat turut melanggengkan konflik.

Selanjutnya, konflik mengakibatkan kontra populasi terhadap masyarakat melalui serangan langsung, teror, perekrutan paksa, kekurangan gizi, penyakit, dan kematian. Seiring populasi petani yang terhenti aktivitas bertaninya atau berhenti bercocok tanam karena situasi yang penuh kecemasan dan kepanikan, anomali situasi kehidupan yang menyebabkan produksi pangan menurun, hingga terjadi defisit makanan yang meluas di berbagai daerah. Kekurangan pangan terkait konflik memampatkan keadaan darurat makanan dalam durasi yang panjang, bahkan setelah pertempuran berhenti.

Semakin memilukan ketika pihak-pihak yang bertikai membajak sebagian besar bantuan pangan yang ditujukan untuk masyarakat selaku pihak non-kombatan. Taktik kendali terhadap kebutuhan pangan menyebabkan kelaparan terjadi dan konflik terus berlangsung. Di Cot Girek, pihak pemerintah maupun pasukan pemberontak telah memanipulasi kelaparan melalui pengendalian wilayah dan orang-orang di dalamnya. Bencana kelaparan dalam situasi konflik bersenjata menjadikan kelaparan sebagai arena pertarungan terhadap suplai makanan.

Skema Kerentanan:



Mengangkut dan menjaga persediaan makanan dalam keadaan darurat disebabkan situasi konflik juga

menghadirkan kantung perekonomian yang tidak lazim, sebagai misal, pihak pemerintah maupun kelompok bersenjata yang

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

menyatakan perlawanan, ada yang mengeksploitasi situasi konflik sebagai sumber utama mata pencaharian, yakni menyediakan kendaraan hingga mengamankan pengangkutan kebutuhan pangan, dan ini bukan jasa kemanusiaan yang bersifat kerelawanan tentunya.

Bahkan ketika masyarakat dan rumah tangga dari warga terlihat aman dalam memenuhi kebutuhan pangan, justru para wanita, anak-anak, orang tua, atau kelompok masyarakat yang terbatas secara sosial dan ekonomi, sesungguhnya mengalami kekurangan makanan yang memadai atau menderita kekurangan gizi. Dalam situasi konflik yang berlangsung, perempuan dan anak-anak biasanya tetap tinggal di kampung atau justru memilih pergi mengikuti akses terhadap makanan, setelah para laki-laki turut ambil bagian dalam memobilisasi pangan melalui pihak-pihak bersenjata, atau ada juga yang bermigrasi untuk mencari makanan tambahan.

Selain tindakan penghancuran yang disengaja, konflik mengakibatkan kerugian yang diinduksi menjadi hasil yang tidak terelakkan dan tidak terduga. Pola tanam pertanian di *gampong* dan produksi makanan menjadi berubah karena pasar sebagai sarana mengakses kebutuhan pangan tidak lagi demikian adanya. Kerawanan pangan pada masyarakat meningkat karena produksi pangan lokal dari hasil pertanian tidak bisa naik ke level yang cukup untuk menggantikan pasar dalam memenuhi sumber makanan.

Ketika sumber pangan utama, yakni padi tidak lagi dapat diproduksi, atau bahkan beras tidak bisa didapatkan, maka singkong/ubi kayu adalah sumber pangan yang diperoleh di areal ladang-ladang yang tersisa. Jika tidak mendapatkan singkong maupun bahan pangan lainnya, maka rasa lapar menjadi petaka yang mesti dihadapi hari ini, lusa, *tulat*, *tubin*, bahkan dalam hari-hari selanjutnya.

5. Tuha Peut: Figur Penting di Tengah Krisis

Tuha peut merupakan satu kelompok penting di tengah masyarakat yang sangat

berperan dalam mengelola kerawanan pangan semasa konflik. Berdasarkan sistem kebudayaan setempat (umum ditemukan pada masyarakat Aceh), *Tuha peut* merupakan suatu lembaga penasehat dan pertimbangan bagi *keuchik* (kepala desa). Jabatan *tuha peut* diperoleh berdasarkan silsilah keturunan dan pengangkatannya oleh para *uleebalang*, yakni kelompok penguasa pada kesatuan teritorial tertinggi.

Uleebalang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pendiri dari wilayah pemukiman inti yang semakin meluas karena penambahan penduduk. Mereka memiliki kewibawaan institusional yang bersumber pada kedudukan mereka sebagai kepala adat. *Uleebalang* diberi surat pengangkatan (*sarakata*) yang dibubuhi dengan cap *sikureang* (cap sembilan) oleh Sultan Aceh. *Sarakata* merupakan lambang kekuasaan yang sangat berharga dalam pandangan rakyat Aceh.

Sultan atau raja menempati posisi teratas yang sakral dan pusat bagi segalanya. Bukan hanya memegang kekuasaan politik tetapi juga kehidupan masyarakat bergantung padanya. Oleh karena itu, *Uleebalang* diterima oleh masyarakat sebagai kelompok pemimpin yang diangkat dengan *sarakata* sultan sehingga terhubung dengan pusat kekuasaan yang sakral dan sakti.

Begitu pula dengan *tuha peut tuha peut* yang berada pada rantai kekuasaan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat di Aceh. *Tuha peut* yang ditunjuk oleh *uleebalang* memiliki kewibawaan sebagai figur masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari pengertian kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*).

Kekuasaan yang dimiliki *tuha peut* merupakan unsur penting dalam mempengaruhi pihak-pihak yang menerima keberadaan mereka. Kekuasaan mereka kemudian diikuti oleh kewenangan dalam mengambil tindakan-tindakan tertentu. Wibawa yang dimiliki oleh *tuha peut* menimbulkan rasa segan, penghormatan dari masyarakat. *Tuha peut* dipandang

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

memiliki kelebihan yang mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.

Sumber-sumber kewibawaan itu meliputi dugaan kesaktian yang dimiliki oleh *tuha peut*, kemudian silsilah keturunan yang menjadi dasar kewibawaan tradisional; penguasaan terhadap ilmu dan pengetahuan terkait agama maupun adat; sifat-sifat kepribadian yang mewakili idealitas kepemimpinan.

Kewibawaan yang dimiliki *tuha peut* ternyata turut berpengaruh dalam meminimalisir kondisi kerawanan pangan yang dialami oleh masyarakat transmigran, terutama semasa terjadinya konflik. Salah seorang *tuha peut* diketahui menjalankan peran yang begitu besar, bahkan dapat dikatakan tindakan yang heroik.

Tuha peut tersebut dengan kewibaannya dapat memberikan kesempatan bagi dirinya untuk terhubung dengan pihak GAM maupun TNI. Keterhubungannya dengan kedua pihak tersebut menjadi penting karena membuatnya dapat mengatur langkah-langkah strategis dalam meminimalisir kerawanan pangan pada masyarakat.

Melalui TNI, *tuha peut* dapat memobilisir bahan pangan dengan rute yang aman karena dikawal oleh pihak TNI. Kepada pihak GAM, *tuha peut* mengajukan kesepakatan agar pihak GAM tidak melakukan penyerangan terhadap pihak yang mengangkut bahan maupun menyabotase bahan pangan yang hendak didistribusikan. Sebagai gantinya, *tuha peut* menjanjikan pembagian bahan pangan kepada pihak GAM yang menyepakati usulannya.

Tuha peut menjadi penghubung penting bagi masyarakat dalam mengakses bahan pangan. Meskipun kesepakatan antara *tuha peut* dengan kedua pihak tersebut tidak selalu terlaksana, upaya yang dilakukan oleh *tuha peut* patut menjadi salah satu catatan reflektif yang sangat penting atas deret peristiwa kerawanan pangan yang terjadi semasa konflik.

D. KESIMPULAN

Kelaparan dan konflik yang terjadi di Cot Girek berimbas dari sebagian ingatan masa lalu dan kebijakan kontemporer tentang pengecualian ras atau agama dan diskriminasi politik maupun ekonomi; termasuk perebutan kendali sumber daya strategis, seperti tanah, air, rute perdagangan, dan deposit mineral bumi. Petaka ketidakpuasan yang meliputi kesenjangan distribusi lahan dan kebijakan ekonomi yang diskriminatif berimbas pada terhalangnya pemenuhan standar hidup yang layak bagi setiap kelompok masyarakat. Ketegangan meningkat menjadi konflik kekerasan terutama ketika kondisi ekonomi memburuk dan orang-orang menghadapi krisis di dalamnya.

Konflik tercipta ketika setiap orang merasa bahwa mereka tidak akan merugi (*croc brain syndorme*) dan karenanya bersedia memperjuangkan sumber daya, kekuatan politik, dan atas nama kehormatan diri dan kelompoknya. Konflik merupakan wujud dari kekerasan politik dan kecurigaan terhadap perdamaian yang saling terkait dengan penguatan legitimasi dan ketidakabsahan kekerasan dan perdamaian.

Konflik bersifat kontekstual dan situasi yang bergerak dalam arena kesenjangan kepentingan. Dukungan terhadap perdamaian, militerisasi dan perang bergantung pada khasanah unik dari konflik yang dihadapi masyarakat. Ada kebutuhan untuk memandang masyarakat tidak hanya sebagai korban, namun juga agen transformasi sosial dan budaya. Aktivisme perdamaian oleh masyarakat semestinya jangan diremehkan. Upaya meredakan konflik dan menciptakan perdamaian adalah dengan meletakkan masa depan sebagai akomodasi antar pihak yang bersengketa dalam mengekspresikan perbedaan tanpa agresi.

Pada masa mendatang, sungguh sudah sepatutnya seluruh pihak menjamin integrasi sosial dalam pengaturan distribusi ekonomi maupun politik secara tepat dan dengan semangat kesetaraan. Dalam isu ketahanan pangan, tujuannya tidak lain adalah

menciptakan kondisi bagi setiap orang pada setiap waktu dapat memperoleh pangan guna menyangga kelangsungan hidup. Ketahanan pangan (*food security*) secara luas dapat juga diartikan sebagai terjaminnya akses pangan untuk segenap rumah tangga serta individu setiap waktu sehingga dapat bekerja dan hidup sehat. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini, hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain.

Ketahanan pangan menjamin kondisi bagi setiap orang di sepanjang waktu memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomis terhadap pangan dalam jumlah yang memadai, aman dan sehat. Sejalan dengan itu, ketahanan pangan dalam implementasinya berkaitan dengan tiga (3) aspek penting yang saling terkait satu sama lain: 1) produksi dan ketersediaan pangan (*food availability*); 2) keterjangkauan pangan (*food accessibility*); dan 3) keterjaminan/kepastian mendapatkan pangan (*food stability*) sesuai mutu dan keamanan pangan. Tonggak ketahanan pangan adalah ketersediaan atau kecukupan pangan dan aksesibilitas bahan pangan oleh anggota masyarakat. Ketiga komponen penting sebagai tonggak ketahanan pangan

dimaksud tentu sangat memungkinkan diimplementasikan dalam kondisi maupun situasi kehidupan masyarakat yang berlangsung kondusif. Dengan demikian, narasi historis sosial di Cot Girek merupakan satu potret reflektif tentang situasi maupun kondisi kerentanan pangan yang sepatutnya dihindari pada masa-masa mendatang.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atas dana hibah riset yang diberikan sehingga memungkinkan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian lapangan dan menyajikan hasilnya ke dalam artikel ini.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Cot Girek dan sekitarnya yang berkenan menerima kehadiran penulis selama melaksanakan penelitian. Dalam kesempatan ini, penulis juga bermohon maaf apabila ada bagian dari tulisan yang kurang berkenan disajikan. Artikel ini sungguh dimaksudkan untuk berkontribusi bagi pengembangan studi-studi ilmiah di bidang ketahanan pangan sekaligus memperluas cakrawala teoretik dalam lintas keilmuan.

Terakhir, penulis berterima kasih kepada pihak redaksi Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Universitas Andalas, atas perkenannya mempublikasikan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adwani, dkk. (2004). "Perlindungan Terhadap Anak di Daerah Konflik Bersenjata Nanggroe Aceh Darussalam". Laporan Hasil Penelitian, Universitas Syiah Kuala.
- Ahimsa-Putra, H.S. (1985). "Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan". *Masyarakat Indonesia*, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia. *Thn. XII (2): 103-133*. Jakarta: LIPI.
- (2007). *Paradigma, Epistemologi, dan Metode Ilmu Sosial-Budaya (Sebuah Pemetaan)*. Makalah disampaikan dalam pelatihan 'Metodologi Penelitian' di Yogyakarta. Penyelenggara: CRCS-UGM.
- Al Chaidar, (eds.). (1999). *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989 – 1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

DOI: 10.25077/jantro.v20.n1.p103-117.2018

JANTRO ISSN: 2355-5963 (Online)

under Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

- Dilley, M. and Boudreau, T. E. (2001). "Coming to Terms with Vulnerability: A Critique of the Food Security Definition". *Food Policy*, Vol. 26 (3):229-247. [https://doi.org/10.1016/S0306-9192\(00\)00046-4](https://doi.org/10.1016/S0306-9192(00)00046-4)
- Hensengerth, O. (2011). "Violence Research in Northeast and Southeast Asia: Main Themes and Direction". *IJCV*, Vol. 5 (1):55-86.
http://www.ijcv.org/index.php/ijcv/article/view/119/pdf_46
- Kell, T. (1995). *The Roots of Acehese Rebellion (1989–1992)*. Ithaca, NY: Cornell University.
- Oliver-Smith dan Hoffman, S.M. (eds.). (2002). *Catastrophe and Culture: The Anthropology of Disaster*. Santa Fe: School of American Research Press.
- Reid, A. (1969). *The Contest for North Sumatra, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Ricklefs, M.C. (1993). *A History of Modern Indonesia since C1300*. London: Macmillan.
- Ridwan. (2000). *Kumpulan Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Pengembangan SDM.
- Singh, D.K. (2010). "Women, Security, Peace And Conflict In South Asia." *The Indian Journal of Political Science*, 71(2), pp. 651-661. <http://www.jstor.org/stable/42753724>
- Spradley, J.P. (2007). *Metode Etnografi*. Terj. M. Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiarti, E., dkk. (2009). "Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): Collective Memory Masyarakat Aceh Tentang Konflik GAM–RI". *Laporan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Batch II*. Tahun Anggaran 2009. Universitas Airlangga.
- Williams, N.E. (2013). "How community organizations moderate the effect of armed conflict on migration in Nepal." *Population Studies*, 67(3), pp. 353-369. <http://www.jstor.org/stable/43287894>